

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Timur Tengah merupakan kawasan yang senantiasa diwarnai oleh konflik. Kandungan minyak bumi, perebutan wilayah, keanekaragaman budaya, sistem politik, posisi geo-strategis, dan intervensi negara-negara besar yang bertujuan meraih kepentingan di Timur Tengah merupakan beberapa penyebab konflik di Timur Tengah terus berkobar, baik konflik negara Timur Tengah dengan bangsa lain, antar negara Timur Tengah, maupun konflik di dalam negeri masing-masing. Salah satu contohnya adalah Konflik Arab-Israel yang hingga saat ini masih berlangsung.

Dinamika penyelesaian konflik Arab-Israel mengalami fluktuasi dari masa ke masa. Terhambatnya upaya penyelesaian konflik tersebut makin mempersulit upaya negara-negara Arab mengusir Israel dari tanah bangsa Arab. Kegagalan sejumlah perundingan memunculkan pesimisme terwujudnya perdamaian antara Arab dengan Israel. Kekhawatiran ini makin diperbesar dengan adanya perpecahan di kalangan negara-negara Arab, dan bahkan di dalam negeri Palestina sendiri. Sejak kekalahan negara Arab dalam perang Arab-Israel tahun 1967, perjuangan bangsa Palestina mempertahankan eksistensinya diserahkan ke tangan bangsa Palestina. Hal ini tidak mudah dilakukan karena pemerintahan Palestina juga mendapat tekanan dari sekutu Israel seperti Amerika Serikat. Masalah yang

dengan adanya perpecahan antara faksi Hamas dan Fatah. Perpecahan tersebut bahkan telah menjadi konflik terbuka dan menelan banyak korban. Konflik Hamas-Fatah menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara Arab sehingga mereka mengusulkan sejumlah perundingan. Mesir, Syria dan Qatar pernah menawarkan perundingan bagi Hamas dan Fatah. Dan yang terakhir dilakukan adalah usulan perundingan dari pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik Hamas-Fatah. Strategi yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam mewujudkan perdamaian di Palestina menjadi hal yang menarik untuk dianalisa sehingga penulis menjadikan topik tersebut sebagai judul dalam penelitian ini.

B. Latar Belakang Masalah

Konflik Arab-Israel sudah dimulai sejak terjadi eksodus besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestina pasca deklarasi Balfour tahun 1917. Konflik ini semakin meruncing setelah majelis umum PBB mengeluarkan sebuah resolusi tentang pembagian wilayah Palestina pada November 1947. Konflik pada tahun itu berubah menjadi pertempuran antara bulan Januari-Februari 1948 yang menelan lebih dari 2.500 korban jiwa. Konflik dalam bentuk peperangan terjadi lebih dasyat setelah Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel yang berpusat di Tel Aviv pada tanggal 14 Mei 1948 bersamaan dengan dilepaskannya mandat Inggris atas Palestina. Pada tahun 1947 ketika terjadi perang Arab Israel, Arab Saudi menunjukkan solidaritasnya yang tinggi bersama negara-negara Arab dan Islam terutama dalam menentang pembagian daerah di Palestina. Di samping

untuk menggabungkan persepsi netral dengan solidaritas Islam untuk melawan negara-negara adikuasa di dunia Islam.¹

Konflik setelah tahun 1947 banyak diwarnai oleh pembantaian orang-orang Yahudi terhadap penduduk Arab-Palestina. Perang-perang antar militer terjadi selama rentang waktu tahun 1948-1982. Perang Suez meletus tahun 1956 di mana Israel berhadapan dengan pasukan-pasukan Arab dibantu oleh Inggris dan Perancis. Tahun 1967 kembali terjadi perang yang sudah mulai melibatkan PLO (*Palestine Liberation Organization*) yang didirikan tahun 1964. Pada perang ini peran Mesir dan Syria sangat signifikan namun pihak Arab mengalami kekalahan. Kekalahan perjuangan di bawah kepemimpinan negara-negara Arab ini kemudian mengalihkan pimpinan perjuangan ke tangan bangsa Palestina sendiri. Sejak tahun 1967, PLO menjadi wakil resmi perjuangan bangsa Palestina.²

Semenjak perang Arab Israel tahun 1967 yang berlangsung selama enam hari di Palestina, terjadi perubahan politik signifikan di Palestina. Selain negara-negara Arab yang bersekutu melawan Israel kalah dalam pertempuran itu lalu akhirnya menyerahkan Palestina ke tangan bangsa Palestina sendiri melalui PLO, perang itu juga telah mengubah peta kekuasaan Israel di Palestina. Israel dapat menguasai Tepi Barat, jalur Gaza, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai yang semula bukan merupakan kekuasaan Israel.

Kekalahan Mesir, Syria dan Yordania dalam perang Arab-Israel tahun 1967 mengakibatkan Arab Saudi muncul dengan posisi yang kuat sehingga mampu mempengaruhi setiap kejadian di dunia Arab. Setelah perang Arab-Israel

1967 berakhir, sengketa Yaman dapat diselesaikan dengan adanya konferensi Khartoum, dimana Arab Saudi menawarkan bantuan kepada Mesir untuk menarik pasukannya dari Yaman dan Arab Saudi menyetujui berdirinya suatu pemerintahan republik di Yaman.

Sejak saat itu, Arab Saudi muncul sebagai negara yang dominan berusaha merubah perimbangan kekuasaan di Timur Tengah. Arab Saudi mulai menarik dukungannya terhadap perjuangan Palestina melawan Israel ketika PLO dipimpin oleh Yaser Arafat menggantikan Yahya Hammuda pada tahun 1969. Yaser Arafat merupakan pimpinan Fatah yang sangat mendominasi PLO, memiliki hubungan dekat dengan Saddam Husein dan hal tersebut tidak disukai oleh Arab Saudi.

Upaya perdamaian konflik Arab Israel terus dilakukan namun belum menunjukkan keberhasilan. Perjanjian perdamaian Mesir – Israel di Camp David tahun 1979 antara Mesir-Israel, kesepakatan Oslo tahun 1993 di Taba-Mesir, kesepakatan Wye River tahun 1998, perundingan Camp David II tahun 2000, dan perundingan-perundingan lainnya gagal membawa perdamaian bagi pihak-pihak yang bertikai.³ Dalam proses perdamaian konflik Arab-Israel dan konflik inter Arab yang memecah belah persatuan bangsa Arab, pemerintah Arab Saudi ikut terlibat dalam serangkaian perundingan dan mediasi konflik di Timur Tengah. Sejarah mencatat bahwa Arab Saudi telah melakukan sejumlah upaya mediasi dalam konflik inter-Arab yang dimulai sejak tahun 1970-an, dan kemudian dikembangkan menjadi strategi yang lebih kompleks. Contohnya adalah mediasi

³ M. H. Al-Sayid, *The Arab World: A History*, 1991, p. 100.

mengatasi konflik Arab-Israel, yang di kemudian hari menjadi *the all-Arab Fez Summit Resolutions* tahun 1981-1982, perundingan Ta'if tahun 1989 untuk mengakhiri krisis politik di Lebanon, dan *King Abdullah's 2002 initiative*, yang kemudian menjadi dasar bagi formula perdamaian Arab-Israel pada saat ini.⁴

Konflik Arab-Israel yang masih berlangsung hingga saat ini adalah masalah berat yang dihadapi Palestina. Selain itu, Palestina juga harus mengatasi kemelut di dalam negeri yakni dengan terpecahnya faksi-faksi kekuatan di Palestina. Konflik antara kelompok Fatah dan Hamas yang semakin meruncing sungguh sangat memprihatinkan. Kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan yang cukup lebar, baik menyangkut ideologi maupun strategi perjuangan.

Kelompok Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmud Abbas lebih berideologi sekuler. Faksi ini pun lebih suka menempuh strategi kompromistis, bahwa untuk mendirikan sebuah negara Palestina merdeka harus dijalin kerja sama yang baik dengan pemerintah Israel. Hal inilah yang telah berlangsung puluhan tahun selama Fatah dan Palestina berada di bawah kepemimpinan Yaser Arafat dan kemudian Mahmud Abbas. Sedangkan kelompok Hamas berideologi agama/Islam. Strategi yang ditempuh pun, terutama dalam hal hubungannya dengan Israel, sangat tegas. Tidak ada kompromi dengan negara Yahudi. Perbedaan sikap fundamental terhadap Israel inilah yang semakin memperuncing konflik di antara mereka.

Sejauh ini, serangkaian inisiatif damai yang diprakarsai sebelumnya gagal akibat dua kendala utama yang masih mengganjal dan dinilai prinsip bagi masing-

masing pihak. Pertama adalah penolakan Hamas atas penugasan membentuk kabinet persatuan nasional dan komitmen pelaksanaan terhadap sejumlah persetujuan sebelumnya. Selain itu yang paling ditolak oleh Hamas adalah pengakuan atas Persetujuan Oslo, yang mengakui eksistensi Israel. Hamas selama ini menuntut pengakuan timbal balik, dengan begitu Israel harus keluar dari wilayah yang diduduki sejak 1967 dan mengakui kemerdekaan Palestina dengan ibu kota Al-Quds. Sedangkan kendala kedua adalah penolakan Hamas memberikan konsesi berupa penunjukan menteri-menteri penting dari kalangan independen sesuai persetujuan luar (AS dan Israel). Pada perundingan sebelumnya di Damaskus, Suriah sebagai pendukung utama Hamas di lingkungan dunia Arab, tidak mampu menekan gerakan perlawanan Islam ini untuk memberikan pengakuan kepada Israel.⁵

Selama beberapa bulan, Mesir, Syria dan Qatar juga pernah memprakarsai perundingan bagi perdamaian Fatah dan Hamas. Upaya ini menemui jalan buntu terutama sejak kemenangan Hamas dalam pemilu di Palestina pada bulan Januari 2006 dan Ismail Haniya terpilih menjadi perdana menteri. Hingga kini Haniya gagal membentuk pemerintahan nasional bersatu yang melibatkan semua unsur bangsa Palestina, terutama dari Fatah.⁶

Kemenangan Hamas membuktikan beberapa hal: *pertama*, stempel teroris yang diberikan oleh rezim zionis dan para pendukungnya di Barat kepada Hamas, sama sekali tidak bisa dipercaya. Dengan demikian, seluruh stempel teroris yang datang dari Barat, juga perlu dipertanyakan, bahkan harus ditolak. *Kedua*,

⁵ mti.ugm.ac.id/~harrismare/wordpress/?p=19 - 15k

⁶ www.opini.wordpress.com/2007/01/08/ - 66k

demokrasi yang ditawarkan oleh Barat telah hancur di Palestina. Jika kita lihat, maka terdapat dua kelompok politik besar yang bersaing di Palestina, Fatah dukungan Barat, dan Hamas yang dimusuhi Barat. Jelas sekali bahwa Hamas telah memperoleh kemenangannya dengan cara yang sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang diakui seluruh dunia. Bahkan AS dan rezim zionis sendiri, tidak memiliki peluang sama sekali untuk mempertanyakan hasil pemilu ini. *Ketiga*, perdamaian yang dijanjikan oleh Barat, juga tidak digubris oleh rakyat Palestina. Konsep perdamaian yang dirancang oleh AS, yang dikenal dengan nama *The Map Road* atau Peta Jalan, sejak awal hingga kini tidak pernah menghasilkan apa pun yang berguna bagi rakyat Palestina.

Kemenangan Hamas dalam parlemen pemilu Palestina mengakibatkan terjadinya ketegangan – ketegangan di Jalur Gaza dengan adanya seruan baru dilakukannya demonstrasi oleh para aktivis partai Fatah. Ribuan pendukung golongan Fatah yang marah membakar mobil-mobil dan melepaskan tembakan ke udara untuk memprotes kekalahan partai itu secara tidak diduga dalam pemilu. Kelompok Fatah juga melakukan pemboikotan besar-besaran terhadap kelompok Hamas. Sementara AS dan Israel yang menilai kelompok Hamas sebagai gerakan teroris, melakukan tekanan secara politik dan ekonomi. Secara politik Amerika Serikat dan Israel membatasi gerak para pejabat Hamas dan memisahkan Gaza dari tepi Barat. Selain itu Amerika Serikat dan Israel memanfaatkan potensi konflik Hamas dengan Fatah agar pemerintahan Hamas ambruk dan dapat mendorong kembali lawan Hamas, yaitu Fatah untuk kembali memimpin

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka timbul pokok permasalahan yaitu: “Bagaimana Strategi Arab Saudi terhadap Upaya Mewujudkan Perdamaian di Palestina?”

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka teori pada dasarnya dipergunakan untuk membantu kita dalam menetapkan tujuan serta arah penelitian. Teori adalah bentuk penjelasan yang paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu bisa terjadi.⁷ Dari pengertian di atas, secara mudah dapat dikatakan bahwa teori adalah sesuatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Untuk menganalisa permasalahan seperti telah tersebut diatas kita memerlukan suatu teori. Adapun teori yang digunakan penulis untuk menjelaskan Peran Arab Saudi Terhadap Perdamaian di Palestina adalah Teori Mediasi Konflik.

Sebelum menjelaskan mengenai teori Mediasi Konflik, penulis terlebih dahulu akan menerangkan mengenai konflik. Konflik hampir selalu terjadi di setiap lapisan sosial di dalam masyarakat. Konflik merupakan refleksi adanya perbedaan kepentingan, nilai-nilai, tujuan, kebutuhan dan persepsi.⁸ Dengan demikian konflik merupakan hal yang lazim yang ditemui di dalam masyarakat demokratis yang plural. Yang harus menjadi perhatian penting adalah bagaimana orang-orang bisa menghadapi konflik tersebut, apakah dengan konfrontasi yang

⁷ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 185

⁸ Jayadeva Uyangoda, "Conflict Resolution & Peace Studies An Introductory Handbook",

penuh dengan kekerasan, dengan mengemukakan tujuan dan tuntutan tanpa mengenal kompromi atau melalui cara yang lebih fleksibel dengan menggunakan instrumen dialog, negosiasi dan kompromi, dan lain sebagainya.

Hugh Miall menawarkan beberapa pendekatan dan cara penyelesaian konflik secara damai dalam resolusi konflik. Penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang melibatkan pihak ketiga yaitu dengan arbitrase dan mediasi.⁹

Negosiasi adalah pembicaraan diantara pihak-pihak yang bertikai dalam merundingkan gagasan, informasi, dan pilihan-pilihan hukum lainnya untuk mencapai sebuah kesepakatan yang bisa diterima semua pihak.¹⁰

Arbitrase ialah upaya yang dilakukan pihak-pihak yang bertikai untuk menyerahkan permasalahan mereka kepada pihak ketiga yang akan membuat sebuah keputusan dalam konflik tersebut, dan bagaimana konflik tersebut bisa diselesaikan. Arbitrator yang dipilih oleh pihak yang berkonflik bisa merupakan orang, negara atau organisasi yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Perbedaan antara negosiasi dan arbitrase adalah, dalam negosiasi pihak-pihak yang bertikai membicarakan tentang masalah mereka sendiri dalam hubungan bipolar, sedangkan dalam arbitrase pihak-pihak yang bertikai melakukan komunikasi dengan pihak ketiga yang menjadi arbitrator.¹¹

⁹ K.J Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hal.186

¹⁰ *Ibid*

Menurut Mohamed Rabie, mediasi bisa didefinisikan sebagai "*an act of outside intervention to assist adversaries to resolved a shared conflict*", sebuah tindakan dari intervensi pihak luar untuk membantu menyelesaikan sebuah konflik. Mediasi dilakukan untuk mengusahakan sebuah proses perdamaian untuk mengajak agar pihak yang bertikai bisa membangun dialog politik yang membangun, atau untuk mentransformasikan dan mengupayakan terbentuknya proses dialog menjadi penyelesaian konflik dan bahkan terwujudnya sebuah perdamaian. Dalam definisi mediasi menurut Rabie terdapat empat elemen penting yang terdapat dalam suatu tindakan mediasi yakni sebagai berikut:¹²

1. Mediasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar konflik (*Neutrality*)
2. Bantuan dari mediator ditujukan untuk menyelesaikan konflik (*Facilitation*).
3. Mediasi merupakan bagian dari resolusi konflik dan proses perdamaian (*Ripe Conditions*).
4. Melalui proses mediasi, pihak-pihak yang berkonflik melakukan dialog yang konstruktif (*Compromise*).

Mediator dalam penyelesaian sebuah konflik merupakan pihak di luar konflik atau disebut juga pihak ketiga yang diderivasi menurut karakteristik tertentu. Mediator tidak boleh merupakan bagian dari pihak yang bertikai, dan

¹² Jayadeva Uyangoda, "Conflict Resolution & Peace Studies An Introductory Handbook",

dengan demikian maka mediator tidak dapat bersekutu atau mendukung salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik. Hal ini biasa di kenal dengan prinsip netralitas. Netralitas mediator sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kondusif dan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap proses negosiasi di kalangan pihak-pihak yang berkonflik.

Terkadang orang-orang cenderung menganggap bahwa mediator dapat membawa pihak yang bertikai ke meja perundingan dan menghasilkan sebuah kesepakatan bagi mereka. Ketika konflik berada dalam situasi di mana pihak-pihak yang bertikai cenderung untuk berperang satu sama lain, dalam situasi ini, tidak satu pihak pun yang mau mengambil langkah pertama untuk mengusulkan negosiasi, karena dengan mengurangi ketegangan militer, akan dipandang pihak lawan sebagai sebuah kelemahan. Dalam hal inilah mediator atau pihak ketiga memegang peran yang sangat signifikan dengan cara memfasilitasi komunikasi di antara dua pihak tersebut. Di sebgai besar konflik bersenjata, mengupayakan terjadinya komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai merupakan tantangan terbesar bagi mediator.

Salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam mediasi konflik adalah memilih waktu yang tepat agar mediasi tersebut bisa efektif atau dengan kata lain kedua pihak yang bertikai dapat menerima manfaat dari mediasi tersebut. Jika hanya satu pihak yang menginginkan mediator berperan dalam penyelesaian konflik mereka, maka kemungkinan besar pihak yang lain akan menolak upaya mediasi. Dalam teori konflik, situasi yang kondusif bagi mediasi konflik disebut

pihak menghadapi jalan buntu (deadlock), dan berakhirnya tenggang waktu (deadline), solusi unilateral, dan pihak yang biasanya menang kehilangan keuntungannya sementara itu pihak yang lemah justru bertambah kuat. Selain tiga hal di atas, yang harus dilakukan mediator adalah mengupayakan agar pihak yang berkonflik melakukan dialog yang konstruktif. Hal tersebut bisa dilakukan jika mediator memahami situasi konflik, penyebab konflik, kondisi pihak-pihak yang berkonflik, dan kemudian menyiapkan draft resolusi konflik yang dapat diterima kedua belah pihak.¹³

Pendekatan teori mediasi konflik tersebut menjadi relevan dengan sikap Arab Saudi sebagai mediator perdamaian antara Hamas dan Fatah. Yang mana dengan kepemimpinan Raja Abdullah, Saudi berhasil menyatukan faksi Fatah dan Hamas untuk menghentikan pertumpahan darah sesama bangsa Palestina. Mereka sepakat membentuk pemerintahan persatuan nasional. Sebelumnya, sejarah mencatat keberhasilan Saudi merekonsiliasi konflik Sudan tahun 1967 dan sukses meleraikan perang saudara Lebanon dengan kesepakatan Thaif 1989.

Upaya meredakan konflik Fatah-Hamas sudah beberapa kali dilakukan, bahkan pada Januari 2007 lalu pimpinan kedua gerakan tersebut bertemu di Damaskus, tetapi hasilnya tetap nihil. Pada mulanya tidak sedikit dari para pengamat konflik Timur Tengah bersikap skeptis dengan hasil pertemuan Makkah. Bahkan polling 3 hari di situs Aljazirah (5/2/2007) memperlihatkan 66,5 persen responden berpendapat bahwa pertemuan tersebut tidak akan dapat

sebaliknya. Hal itu disebabkan kegagalan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang selalu saja kandas oleh tiga butir permasalahan yang belum dapat dikompromikan oleh keduanya. Bahkan ketiga hal ini masih hangat diperdebatkan dalam sidang *preparatory committee* (6/2/2007) yang mendahului pertemuan pimpinan Fatah, Mahmud Abbas (Abu Mazen) dan pimpinan Hamas, Khaled Mesha'al, di Makkah.

Pertama, dalam naskah program pemerintahan persatuan nasional yang diajukan oleh Fatah, dimuat kata *al-iltizam* (komitmen) pada keseluruhan kesepakatan yang telah dicapai oleh Otoritas Palestina pada masa lalu. Kata tersebut dipahami oleh Hamas sebagai bentuk pengakuan secara implisit terhadap Israel, dan ini tidak dapat diterima. Untuk itu Hamas meminta agar kata *iltizam* diubah menjadi *ihthiram* (menghormati). Namun usulan perubahan Hamas tidak dapat diterima oleh Fatah yang melihatnya tidak cukup kuat untuk mengakhiri embargo pihak Amerika, Eropa, dan Israel yang menginginkan pengakuan terhadap eksistensi Israel secara konkret.

Kedua, Hamas menginginkan agar salah satu kalimat 'yang tidak bertentangan dengan hak-hak bangsa Palestina atau 'yang dapat melindungi hak-hak bangsa Palestina' ditambahkan dalam klausul interaksi dengan berbagai kesepakatan dan komitmen program politik pemerintahan kesatuan nasional. Dalam konteks ini, Fatah memandang kalimat yang diajukan oleh Hamas dapat menghapus makna substansial dari kalimat *iltizam* atau *ihthiram* tersebut. Usulan itu juga dipandang Fatah sebagai kalimat-kalimat yang dapat menggiring kepada

kontradiktif dengan hak-hak bangsa Palestina. Untuk itu maka semuanya harus direvisi atau digugurkan.

Ketiga, komposisi kabinet pemerintahan persatuan pembangunan juga menjadi butir lain yang diperselisihkan. Pada awalnya Hamas tidak mengajukan nama-nama calon independen yang dipersyaratkan Fatah sebelumnya untuk mengisi kursi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan lainnya kepada Presiden Abu Mazen. Sikap Hamas yang demikian dipandang Fatah menyulitkan, karena membuat gerakan pimpinan Abu Mazen tersebut tidak dapat mengambil sikap. Sudah rahasia umum bahwa kursi Mendagri selama ini menjadi ajang perebutan sengit di antara keduanya, karena ia mengendalikan aparat keamanan di wilayah Otoritas Palestina.¹⁴

Dalam upaya mewujudkan perdamaian konflik antara Hamas dan Fatah, Arab Saudi menggunakan pendekatan mediasi. Agar upaya mediasi tersebut berhasil, Arab Saudi menggunakan beberapa strategi untuk mempermudah membujuk kedua belah pihak yang bertikai agar bersedia kembali ke meja perundingan. Sebagai mediator, Arab Saudi berupaya untuk bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak, memfasilitasi pertemuan Hamas dan Fatah di Mekkah serta menggunakan persuasi agar Hamas dan Fatah bersedia mengakhiri konflik yaitu dengan menawarkan bantuan dana demi suksesnya perundingan tersebut. Perundingan di Mekkah dilakukan setelah beberapa perundingan sebelumnya yang dilakukan oleh Mesir, Syria, dan bahkan Qatar gagal membuahkan perdamaian antara Hamas dan Fatah. Oleh karena itu Arab Saudi

¹⁴“Pertemuan Mekkah skoci penyelamat Palestina”

berupaya memahami kondisi konflik Hamas dan Fatah kemudian Arab Saudi menyusun draft resolusi konflik yang dapat diterima oleh keduanya.

E. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas dan dengan menggunakan kerangka teori yang ada, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut. Strategi yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam mewujudkan perdamaian di Palestina antara Hamas dan Fatah adalah :

1. menjaga netralitas di setiap perundingan.
2. memfasilitasi perundingan di Mekkah dengan memberikan bantuan dana kepada pihak yang berkonflik.
3. memilih waktu yang kondusif bagi upaya mediasi yaitu ketika Hamas dan Fatah menghadapi jalan buntu (*deadlock*) .
4. menyiapkan draft resolusi konflik yang dapat diterima oleh Hamas dan Fatah.

F. Tujuan Penelitian

1. Mencoba memberi gambaran yang objektif tentang Strategi Arab Saudi dalam mewujudkan Perdamaian di Palestina.
2. Untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai metode Ilmu Hubungan Internasional dan teori-teori Hubungan Internasional pada umumnya serta khususnya pada masalah yang berkaitan dengan Peran Arab Saudi Terhadap Perdamaian di Palestina.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup atau jangkauan penelitiannya, penulis

dalam pemilu di Palestina sampai dengan tahun 2007 yaitu pada saat penelitian ini dilakukan.

H. Metode Pengumpulan Data

Seperti halnya para penulis dan peneliti yang lainnya, dalam tulisan Ilmu Hubungan Internasional penulis akan menggunakan metode penelitian dengan didukung oleh data sekunder dari hasil kajian pustaka atau *library research*. Adapun sumbernya adalah berbagai buku, majalah, jurnal politik, media massa, browsing internet dan literature lainnya yang berkaitan dengan Strategi Arab Saudi dalam Mewujudkan Perdamaian di Palestina.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa Bab :

- Bab I Pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, kerangka dasar teori, rumusan masalah, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan
- Bab II Dinamika Keterlibatan Arab Saudi dalam Perdamaian Konflik Israel- Palestina
- Bab III Dinamika Konflik antara Hamas dan Fatah